



MAHEIN NIA LIAN No. 3, 25 Sept 2009.

Sebuah Tinjauan Keamanan di Timor Leste

Oleh: Isolino Guterres¹

Pemulihan keamanan nasional merupakan prasyarat penting dalam mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terjaminnya rasa aman, damai dan tertib memberikan ketenteraman kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sekaligus untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para investor untuk menginvestasi di Timor Leste. Oleh sebab itu langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk pemulihan keamanan nasional adalah melalui beberapa kegiatan seperti memerangi dan mengatasi ancaman terorisme internasional yang dapat melancarkan aksinya di dalam negeri, maupun di luar negeri bersama-sama dengan kekuatan negara lain seperti Negara Australia dan Indonesia; mengembangkan pendekatan rekonsiliasi secara nasional berdasarkan semangat permusyawaratan dalam upaya pemulihan konflik-konflik yang bersifat politik dan kedaerahan; seperti rekonsiliasi yang dilakukan oleh Xanana Gusmao dengan orang Timor Leste yang tinggal di Kupang dan konflik kedaerahan yang terjadi pada 2006 lalu; mengatasi dan mencegah kejahatan lintas negara khususnya di wilayah darat perbatasan antara Timor Leste dengan Indonesia.

Profesionalisme PNTL dalam Menegakan Keamanan

Perkembangan masyarakat Timor Leste yang bisa dikatakan cukup pesat, seiring dengan tuntutan hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab PNTL. Kondisi itu menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas PNTL yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Harus diakui bahwa masalah keamanan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab karena itu pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi PNTL yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi sangat penting. Oleh karena itu PNTL dapat dikatakan sebagai cerminan masyarakat, terutama cerminan terhadap ketertiban, keamanan dan

¹ University of Tasmania, Sandy Bay Campus



ketenteraman dan oleh karenanya perkembangan PNTL harus sejalan dengan aspirasi yang sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Penyerahaan tugas dari Polisi PBB ke PNTL merupakan suatu langkah yang positif agar PNTL dapat mempunyai tanggung jawab dan komitmen dalam melakukan pengamanan secara langsung di masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab berat yang diemban oleh PNTL dan kita mengharapkan agar PNTL akan selalu berkelakuan baik di depan masyarakat. Namun tidak disangkal bahwa terkadang PNTL dalam melakukan tugasnya dapat melanggar norma-norma yang berlaku seperti melanggar hak asasi manusia, mengancam penduduk dengan pistol atau melakukan kekerasan dan menganiya masyarakat. Oleh karena itu hal-hal seperti ini harus dihindari dan akan lebih jika PNTL sendiri mempunyai sanksi internal untuk para oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang senonoh di lingkungan masyarakat agar menyadarkan para oknum tersebut untuk lebih mengarah ke PNTL yang profesional.

PNTL yang profesional adalah PNTL yang mempunyai komitmen untuk terus menuju ke arah peningkatan mutu kinerja dalam melaksanakan tugas yang diemban; memudahkan urusan warga masyarakat tanpa perlu meminta imbalan; peduli terhadap persoalan keamanan warga masyarakat dalam kondisi bagaimanapun, serta selalu berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami warga masyarakat dengan cara santun, bukan dengan cara kekerasan. PNTL yang profesional berarti PNTL yang selalu mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dalam negeri, kehidupan bermasyarakat baik lokal, regional, nasional maupun internasional sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan lebih lanjut lagi PNTL yang profesional harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar selalu cepat menyelesaikan tindak kejahatan yang terjadi dengan mutu tinggi.

Profesionalisme polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas untuk memberikan keamanan kepada masyarakat, mengingat teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Jika polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (law enforcement agency) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance). Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system. Berbeda dengan aparat penegak hukum yang lain seperti jaksa, hakim atau pengacara, polisi harus bergelut dengan hukum ketika masalahnya masih "berdarah-darah atau berkeringat." Polisi harus mampu menyibak gelapnya sebuah kasus kejahatan menjadi terang benderang. Mereka harus melakukan penyelidikan, mencari petunjuk, mengumpulkan bukti, saksi dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas-tugas itu berbagai kendala-hambatan harus dihadapi. Berbeda dengan jaksa

atau hakim yang berbadapan dengan hukum ketika hukum tersebut sudah relative "matang".

Dalam meningkatkan peranan PNTL untuk menjamin keterttiban dan tegaknya hukum, terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri diharapkan agar pihak PNTL meningkatkan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan persoalan-persoalan konkrit yang dihadapi serta segera dapat mengambil keputusan mengenai tindakan yang harus diambil. PNTL perlu meningkatkan aksesnya terhadap informasi yang lebih memadai untuk setiap tingkatan institusinya. Dan PNTL tidak sekedar melayani tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka menjaga lingkungannya agar aman dan tertib.

Peranan National Intelligence Service (NIS)

Dengan berdirinya NIS di Timor Leste merupakan strategi baru pemerintah untuk lebih menjamin keamanan di Timor Leste. Institusi ini dapat membaca atau menganalisa lebih cermat situasi khususnya dalam negeri untuk mencegah aksi-aksi terror yang dapat terjadi. Oleh sebab itu diharapkan agar NIS dapat berfungsi dengan baik. Kasus penembakan Presiden dan Perdana Menteri dapat dikategorikan bahwa Intilijen dari pihak kepolisian atau F-FDTL Timor Leste pada waktu itu masih sangat lemah, oleh karena itu dengan berdirinya NIS dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keamanan dan keestabilan Timor Leste.

Peran NIS sangatlah besar di Timor Leste, namun harus menghindari tindakan diskriminatif terhadap hak asasi manusia dan mereka harus melakukan pelayanan intelijen yang baik untuk mengumpulkan informasi dan menganalisa dengan baik agar tepat sasaran. NIS juga dalam melakukan tugasnya harus bersifat imparisial atau tidak memihak dan NIS akan sering melakukan penangkapan seperti tugas kepolisian dan hal ini bisa menjadi kompetisi dalam pengelolaan keamanan, oleh karena itu peranan NIS dan PNTL harus dikaji lebih mantap agar tidak terjadi kompetisi dalam menjaga keamanan Timor Leste. Kita mengharapkan bahwa NIS tidak akan memihak pada salah satu partai atau kelompok namun lebih melihat pada kepentingan nasional Timor Leste

Referensi:

('Towards the rule of law in Timor-Leste Approved by the Council of Ministers' 2007; Yuliastuti 2006)



'Towards the rule of law in Timor-Leste Approved by the Council of Ministers',
2007, East Timor Law Journal

Yuliasuti, D 2006, 'Intelijen Indonesia Dinilai Tak Berfungsi hapadi Terorisme',
Tempo.

